

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET, SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA ASET, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)**

**Dian Nilliani**

*Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten  
KP3B Jl. Syech Nawawi Al Bantani Palima – Serang  
[diannilani24@gmail.com](mailto:diannilani24@gmail.com)*

**Abstract**

*This study aims to examine the effect of asset management implementation, the quality of human resource management assets, and the government's internal control system, on the quality of financial reporting. The population in this study were all employees / officials managing finances and assets of the Regional Devices Organization in the Banten Provincial Government with sampling using purposive sampling with the number of respondents as many as 123 respondents. Data analysis using SmartPLS. The results of this study prove that the implementation of asset management, the quality of human resource management, and the government's internal control system provide a positive effect on the quality of financial reporting.*

**Keywords : Asset Management, Quality of Human Resources, Government Internal Control System, Quality of Financial Reporting.**

**PENDAHULUAN**

Pelaporan kinerja keuangan pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan amanah yang diberikan oleh rakyat sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara (Pramono *et al.*, 2010). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami, sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya (PP 70/2010). Kualitas pelaporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya adalah optimalisasi mengenai implementasi manajemen aset (Tangke *et al.*, 2015). Selain hal tersebut kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi pula oleh dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang baik. (Hanis *et al.*, 2017) menyatakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan penerapan manajemen aset di sektor publik adalah sumber daya manusia yang kompeten. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Mahmudin (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia khususnya akuntan internal berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan/aset maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Suyono (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah *internal control*, atau dalam sektor pemerintahan lebih dikenal dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sebagaimana yang diungkapkan oleh Warren *et al.* (2005) bahwa *internal control* berfungsi untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pada setiap entitas pelaporan dan akuntansi ditegaskan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yang secara eksplisit mengatur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian internal menurut *Commitee of Sponsoring Organizations (COSO)*.

Fenomena permasalahan tentang kualitas pelaporan keuangan di Indonesia dibuktikan dengan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). IHPS BPK Tahun 2017, menyebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan selama semester II 2017, terdapat 4.430 temuan yang memuat 5.852 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri dari 1.082 kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 1.950 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 triliun, dan 2.820 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,67 triliun. Dari 1.950 permasalahan ketidakpatuhan, sebanyak 1.452 senilai Rp10,56 triliun yang terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 840 permasalahan senilai Rp1,46 triliun.

Fenomena masih belum cukup baiknya kualitas pelaporan keuangan juga terjadi di Provinsi Banten yang merupakan wilayah sasaran dalam penelitian ini. Meskipun mengalami peningkatan terhadap pencapaian opini, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Banten terutama terkait dengan permasalahan manajemen aset. Permasalahan yang disampaikan oleh BPK RI dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdiri dari permasalahan kelemahan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah serta masih lemahnya implementasi manajemen aset. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kualitas informasi keuangan, khususnya yang disajikan dalam LKPD belum sepenuhnya memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (BPK RI, 2017).

Sumber daya manusia pengelola akuntansi/aset yang kompeten, serta adanya implementasi manajemen aset yang baik, yang didukung oleh sistem pengendalian internal yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah (Setiyawati, 2013). Penelitian-penelitian tentang hal yang terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan seperti kompetensi sumber daya manusia, implementasi manajemen aset, dan penerapan sistem pengendalian internal sudah banyak dilakukan seperti yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi berdasarkan temuan hasil pemeriksaan BPK RI pada IHPS BPK RI Semester II Tahun 2017, masih menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internal secara signifikan dan kelemahan dalam implementasi manajemen aset. Berdasarkan alasan tersebut maka faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan masih menarik untuk diteliti.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian Mahmudin (2017), tentang impementasi manajemen aset di sektor pemerintahan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan di atas adalah penelitian ini menambahkan variabel kualitas sumber daya manusia pengelola aset di sektor pemerintahan dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Kemudian penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada entitas akuntansi atau tingkat organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Sedangkan pada penelitian sebelumnya meneliti faktor-faktor tersebut hanya dari sisi entitas pelaporan di pemerintah daerah.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

*Agency Theory*, awalnya dikonsepsi oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menganalisa hubungan yang terjadi ketika seorang individu (*principal*) mengakui otoritas lain (*agent*) untuk bertindak atas nama *principal*, sehingga menghasilkan keuntungan pada kekayaan yang dikelola dengan keputusan yang diadopsi oleh agen. Kemudian Mardiasmo (2009) menjelaskan pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*).

Pengelolaan barang milik negara/daerah atau manajemen aset menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, adalah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan yang

meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan tuntutan ganti rugi.

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Dikatakan oleh Nogi (2005) bahwa asset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan oleh manajemen adalah manusia (sumber daya manusia atau *human resource*). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Kharis, 2010). Menurut Azhar (2007) mendefinisikan bahwa “Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut”. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Istilah Pengendalian Internal dalam sektor pemerintahan termaktub di dalam PP 60 Tahun 2008 yang disebut dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), pengertian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Implementasi manajemen aset secara umum berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan IHPS BPK RI salah satu munculnya opini disclaimer hasil pemeriksaan BPK RI adalah lemahnya pengelolaan aset atau barang milik negara. Salah satu kendala yang paling sulit untuk mendapatkan opini WTP adalah disebabkan oleh masalah pengelolaan aset, yaitu adanya ketidaksesuaian pencatatan akuntansi dengan SAP, kesalahan prosedur dalam pemanfaatan aset, dan juga nilai aset tetap yang tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Mahmudin (2017) dalam penelitiannya tentang implementasi manajemen aset terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, menyatakan bahwa implementasi manajemen aset memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah Provinsi Banten. Sebelumnya dengan hasil penelitian (Tangke *et al.*, 2015), menyatakan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian beberapa hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>1</sub> : Implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014). Penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Kiranayanti dan Erawati (2016), menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian Mahmudin (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pengelolaan keuangan atau kompetensi akuntan internal

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Suyono (2016) penelitiannya tentang identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas masih terdapat perbedaan terkait dengan hasil penelitian mengenai sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan khususnya di pemerintah daerah. Maka dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

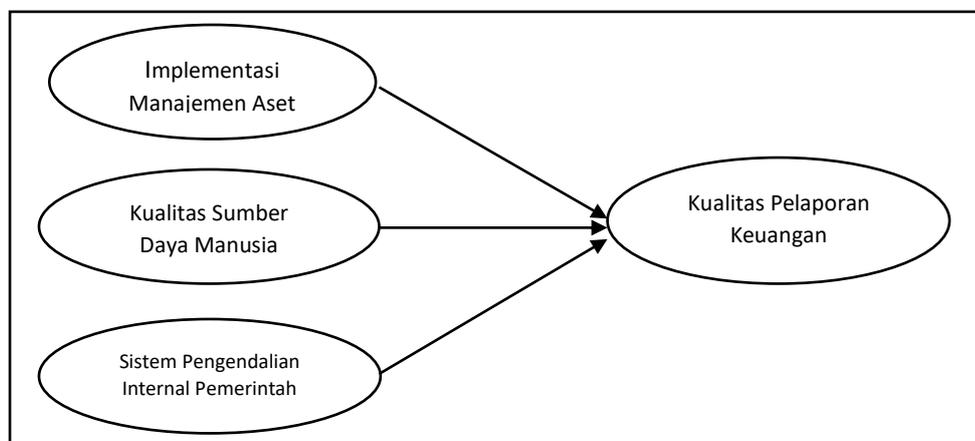
**H<sub>2</sub> : Kualitas sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal, hal ini dikemukakan oleh (Arens, 2014) bahwa sistem pengendalian internal sangat penting dalam pengendalian yang efektif bagi manajemen dalam rangka memenuhi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini berarti salah satu tujuan dirancangnya sistem pengendalian internal adalah keandalan pelaporan keuangan, yaitu keandalan merupakan salah satu karakteristik kualitatif dalam informasi akuntansi yang digunakan sebagai pengukuran dalam kualitas pelaporan keuangan (Keyso, 2012). Setiyawati 2013, menyatakan bahwa Implementasi sistem pengendalian internal secara bersamaan berpengaruh positif pada kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian Efektivitas pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan (Indriasih dan Koeswayo, 2014). Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Afiah (2015) yang menyatakan implementasi sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil beberapa penelitian tersebut di atas didukung oleh hasil penelitian Mahmudin (2017), yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan dapat disusun hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut:

**H<sub>3</sub> : Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.**

Keterkaitan antara implementasi manajemen aset, kualitas sumber daya manusia pengelola aset, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelaporan keuangan dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber : Mahmudin (2017) & Kiranayanti & Erawati (2016)

**METODE PENELITIAN**

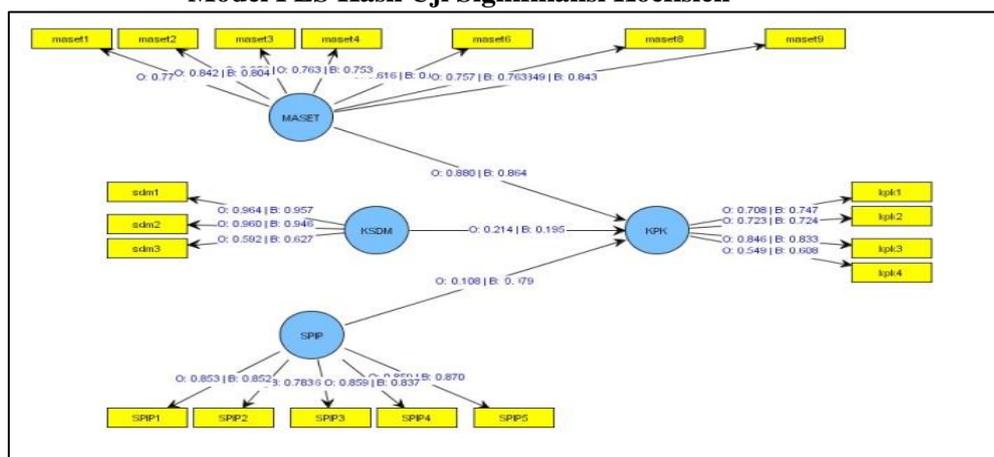
Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, analisis data dilaksanakan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis yang digunakan untuk analisa data akan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif tentang rangkuman pengamatan terhadap setiap variabel penelitian yang secara umum menguraikan tentang ukuran dan sebaran dari setiap variabel penelitian seperti apa adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis deskriptif data setiap variabel penelitian dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain. Analisis deskriptif menggunakan bentuk tabel jumlah skor dan persentase. Analisis deskriptif data setiap variabel penelitian menggunakan kriteria skor tanggapan responden. Kategorisasi skor tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan kategorisasi jenjang merujuk kepada Narimawati (2010). Kategorisasi bersifat relatif, maka luas interval dapat ditetapkan secara subyektif yang mencakup setiap kategori yang diinginkan selama penetapan tersebut berada dalam batas kewajaran dan dapat diterima akal sehat (*common sense*). Pada penelitian ini setiap indikator memiliki 1 item pernyataan dengan yang harus diisi oleh responden, yang selanjutnya akan digunakan metode kategorisasi skor tanggapan responden. Skor digolongkan menjadi 5 kategori yaitu Tidak Baik, Kurang Baik, Cukup Baik, Baik, dan Sangat Baik.

Selanjutnya statistik infrensia atau dikenal statistik induktif atau statistik probabilitas merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan diberlakukan untuk populasi (*generalisasi*) melalui pengujian taraf signifikansi data sampel (meskipun tidak menjadi fokus utama dalam penggunaan *partial least square-path modeling*) terhadap parameter populasinya melalui uji t (*t-statistic*) pada taraf keyakinan (*confidence interval*) sebesar 95% dan risiko kesalahan pada  $\alpha=5\%$ . Hasil analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel eksogen terhadap endogen. Untuk tujuan analisis data, pola hubungan antara variabel eksogen dan endogen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square-Path Modeling* (PLS-PM). *Partial least square* merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus besar, dan data tidak harus berdistribusi *normal multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai rasio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitik beratkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka spesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter. Kelebihan PLS adalah dapat menganalisis sekaligus konstruk yang dibentuk dengan indikator refleksif dan indikator formatif, dan hal ini tidak mungkin dijalankan dalam *Covariance Based SEM* karena akan terjadi *unidentified model*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil *Output SmartPLS* dapat dilihat hasil pengolahan data sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Model PLS Hasil Uji Signifikansi Koefisien**



Berikutnya hasil uji koefisien dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Path Coefficients Antar Variabel dan Uji Signifikansi**

	original sample estimate	mean of subsamples	standard deviation	T-statistic
MASET -> KPK	0,880	0,876	0,114	7,724
KSDM -> KPK	0,214	0,194	0,101	2,108
SPIP -> KPK	0,108	0,093	0,047	2,288

Sumber : Data diolah, 2019

Hasil uji *Path Coefficients* pada model struktural di atas menunjukkan bahwa koefisien jalur dari MASET terhadap KPK, KSDM terhadap KPK, dan SPIP terhadap KPK teruji signifikan memberikan pengaruh ( $t$ -statistic >  $t$  tabel = 1,96). Berdasarkan hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa implementasi manajemen aset berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai  $t$ -statistik > 1,96 (7,724 > 1,96). Adapun arah pengaruh dari implementasi manajemen aset terhadap kualitas pelaporan keuangan adalah positif yang menunjukkan semakin tinggi kualitas implementasi manajemen aset maka akan semakin baik kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan analisis deskriptif yang telah dijelaskan di atas terlihat bahwa indikator-indikator yang mendominasi implementasi manajemen aset di lingkungan pemerintah Provinsi Banten terdiri dari pengamanan dan pemeliharaan, kemudian pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset serta perencanaan dan penganggaran serta pengadaan. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah Provinsi Banten lebih memfokuskan pada hal-hal tersebut dalam implementasi manajemen aset daerahnya.

Data BPK RI selama kurun waktu 5 tahun terakhir Provinsi Banten mengalami peningkatan terhadap pemberian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diberikan oleh BPK RI. Untuk LKPD Tahun 2013 Provinsi Banten mendapatkan opini *Disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), selanjutnya LKPD Tahun 2014 juga masih tetap mendapatkan opini *Disclaimer* atau TMP, kemudian LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan opini yaitu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan untuk LKPD Tahun 2016 juga mengalami peningkatan opini yaitu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), begitu pula untuk LKPD Tahun 2017 pemerintah Provinsi Banten mampu mempertahankan opini BPK tahun sebelumnya yaitu mendapatkan opini WTP. Namun demikian meskipun mengalami peningkatan terhadap pencapaian opini, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Banten terutama terkait dengan permasalahan manajemen aset. BPK RI menyatakan bahwa salah satu kendala yang paling sulit untuk mendapatkan opini WTP terutama adalah masalah aset, ketidaksesuaian antara catatan dengan keberadaan fisik aset, dan nilai aset yang belum direvaluasi menjadi catatan dalam setiap audit yang dilakukan BPK. Ketidaksesuaian yang dimaksud tersebut adalah ketidaksesuaian dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Sedangkan implementasi manajemen aset pada penelitian ini adalah implementasi manajemen aset berdasarkan PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah. PP Nomor 27 tahun 2014 lebih memfokuskan pengelolaan barang negara/daerah secara administratif, sedangkan hal-hal yang terkait dengan akuntansi tidak dijelaskan secara detail, seperti pencatatan maupun pelaporan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tangke *et al.*, (2015) yang menyatakan bahwa optimalisasi manajemen aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Syukri (2015) yang menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan aset berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Mahmudin (2017), yang menyatakan bahwa implementasi manajemen aset, berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut hasil penelitian ini juga mendukung hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2017 dalam press release penyerahan LHP BPK untuk Provinsi Banten, meskipun telah mendapatkan opini WTP tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti terkait pengelolaan aset dan hal tersebut dapat

memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Fenomena masih terdapatnya permasalahan kualitas pelaporan keuangan khususnya di pemerintah Provinsi Banten terjawab dengan masih belum optimalnya implementasi manajemen aset sebagaimana dijelaskan di atas. Sejak awal tahun 2016 pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan aset sesuai dengan rekomendasi dari BPK RI. Hasil evaluasi pemerintah Provinsi Banten terkait dengan optimalisasi implementasi manajemen aset sudah mencapai hasil yang baik, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian ini yang mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari responden terkait dengan implementasi manajemen aset di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Adanya implementasi manajemen aset yang baik khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dibuktikan pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah Provinsi Banten telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Hasil penelitian ini juga mendukung *agency theory* yaitu sudah menjadi kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik, dan untuk mendukung hal tersebut diperlukan dukungan implementasi sistem yang baik, dalam hal ini implementasi manajemen aset. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik implementasi manajemen aset akan semakin baik pula hasil kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *t-statistik*  $> 1,96$  ( $2,108 > 1,96$ ). Adapun arah pengaruh dari kualitas sumber daya manusia pengelola aset terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah adalah positif yang menunjukkan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia pengelola aset maka akan semakin baik kualitas pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan analisis deskriptif, kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan menggunakan 3 indikator yaitu latar belakang pendidikan, pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman. Indikator pengalaman berada pada kriteria tanggapan yang sangat baik berdasarkan tanggapan dari seluruh responden dibuktikan dengan hasil skor yang paling tinggi atau mencapai 88,13%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai atau pejabat yang menangani pekerjaan bidang perencanaan, penatausahaan, dan pengelolaan keuangan dan aset memiliki pengalaman kerja sebelumnya yang telah sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penataan pegawai dengan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah sangat baik dilaksanakan. Terlebih lagi mulai akhir tahun 2018 ini pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan kebijakan penempatan pegawai sesuai dengan formasi nama jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam peraturan kepala daerah yang telah diterbitkan. Selanjutnya indikator latar belakang pendidikan, berdasarkan hasil analisis deskriptif juga berada pada kriteria tanggapan yang sangat baik yaitu dibuktikan dengan skor 86,41%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator latar belakang pendidikan pegawai dalam kaitannya dengan latar belakang pendidikan pegawai atau pejabat yang menangani pekerjaan bidang perencanaan, penatausahaan dan pengelolaan keuangan dan aset telah sesuai dengan bidang pekerjaan saat ini mendapatkan tanggapan yang sangat baik dari seluruh responden dalam penelitian ini. Dapat dikatakan pula bahwa penataan pegawai dengan indikator latar belakang pendidikan dari para pegawai atau pejabat dalam hal kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah sangat baik dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kiranayati dan Erawati (2016) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Azmi, dkk (2014) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemudian hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Mahmudin (2017) bahwa kompetensi sumber daya manusia khususnya akuntan internal berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan, sehingga dapat dikatakan semakin baik kualitas kompetensi sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan/aset maka kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan semakin baik pula. Namun berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya Suyono (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah yang negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia

pengelola aset berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah. Hal ini tidak lepas dari upaya pemerintah Provinsi Banten sejak awal tahun 2016 telah melaksanakan rekomendasi dari BPK RI terkait dengan evaluasi sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Provinsi Banten agar dilaksanakan penataan pegawai yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, serta pengalaman kerja sebelumnya. Hasil dari evaluasi penataan pegawai tersebut akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakannya. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian ini yaitu yang dibuktikan dengan tingkat tanggapan responden terkait dengan kompetensi sumber daya mendapatkan hasil tanggapan yang sangat baik. Kualitas sumber daya manusia pengelola aset yang baik khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah. Kaitan antara kualitas sumber daya manusia pengelola aset dengan pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *agency theory*, secara garis besar tentu saja setiap pegawai dalam hal ini para pengelola keuangan dan aset memiliki amanah untuk memberikan hasil kerja yang terbaik khususnya dalam bidang pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset, yang tentu saja untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan yang baik harus didukung oleh tingkat kualitas kompetensi yang baik pula.

Hasil uji signifikansi koefisien jalur pada model struktural menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini dibuktikan oleh nilai *t-statistik* yang diperoleh lebih besar dari 1,96 ( $2,288 > 1,96$ ). Pada penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah diukur oleh 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Indikator pemantauan dalam sistem pengendalian intern pemerintah merupakan indikator yang paling dominan dalam indikator variabel penelitian ini. Kemudian untuk variabel kualitas pelaporan keuangan daerah diukur dengan menggunakan 4 indikator, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Hasil analisis deskriptif menunjukkan indikator relevan merupakan indikator yang paling dominan dalam mendeskripsikan variabel kualitas pelaporan keuangan daerah.

Indikator pemantauan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah yang berkaitan dengan proses menindaklanjuti rekomendasi temuan dari aparat pengawas intern pemerintah berada pada kriteria sangat baik yaitu dibuktikan dengan skor mencapai 89,69%. Hal ini dapat diartikan bahwa semua temuan APIP atau BPK di lingkungan pemerintah Provinsi Banten sudah ditindaklanjuti dengan baik, terlebih lagi sekarang ini pemerintah Provinsi Banten sudah mulai melaksanakan sistem *e-government* yaitu semua proses tata kelola pemerintahan mulai dari urusan perencanaan, penatausahaan keuangan, dan pengelolaan akuntansi keuangan bahkan untuk urusan kepegawaian sudah menggunakan aplikasi sistem informasi yang berbasis internet. Sementara untuk indikator yang paling dominan dalam mengukur kualitas laporan keuangan daerah adalah relevan yang dibuktikan dengan skor indeks 89,22% yang berada pada kriteria tanggapan sangat baik. Hal ini menunjukkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disajikan tepat waktu dan lengkap sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan agar informasi yang dihasilkan bermanfaat dalam pengambilan keputusan sudah sangat baik dan relevan.

Pada penelitian ini sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara positif terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Indriasih dan Koeswayo (2014) yang menyatakan bahwa efektifitas pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, hasil penelitian ini juga tidak mendukung hasil penelitian Mahmudin (2017) yang menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Nuryanto dan Afiah (2013) yang menyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah memberikan pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini mendukung upaya pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan solusi terkait dengan fenomena permasalahan sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya yaitu berdasarkan data BPK RI tahun 2013 sampai dengan 2017 bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kelemahan-kelemahan SPIP tersebut paling dominan terkait pengelolaan aset. Berdasarkan hasil olah data statistik secara kriteria

tanggapan responden untuk semua indikator yang digunakan pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah berada pada kriteria yang sangat baik, dan terbukti secara signifikan dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Sejak tahun 2018 pemerintah Provinsi Banten telah melaksanakan kerjasama dengan BPKP. Bentuk kerjasama ini adalah berupa pendampingan oleh BPKP terkait penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, yaitu dengan cara membentuk tim satuan tugas SPIP di masing-masing OPD yang langsung didampingi oleh BPKP sebagai supervisor. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh BPKP yaitu dengan melakukan inventarisasi dan analisa resiko kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten. Keterkaitan adanya *agency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pelaporan keuangan, yang dimana pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (*agent*) maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai *principal* untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan rumusan masalah, pengembangan hipotesis atas dasar teori-teori yang berhubungan, serta hasil analisis yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa Implementasi manajemen aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan, Kualitas sumber daya manusia pengelola aset berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dan yang terakhir Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih terdapat beberapa keterbatasan, yang kemungkinan dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan pada hasil penelitian ini, diman Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan pada penelitian ini hanya terdiri dari tiga variabel, yaitu implementasi manajemen aset, kualitas sumber daya manusia pengelola aset, dan sistem pengendalian internal pemerintah, sedangkan masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kemudian pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan atau pernyataan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden yang memungkinkan tidak menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil analisis maupun interpretasi hasil penelitian serta observasi penelitian ini, dapat dikemukakan saran-saran operasional untuk pemerintah Provinsi Banten sebagai berikut : Disarankan untuk menyusun kebijakan untuk mempercepat proses inventarisasi dan penetapan aset yang akan dihapuskan secara periodik per semester sehingga data-data yang akurat mengenai aset dapat lebih meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Disarankan masing-masing pimpinan bagian pada unit kerja memerintahkan kepada pejabat atau pegawai yang menangani pengelolaan aset untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaannya saat ini untuk mendukung peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah. Disarankan pula kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai instansi induk pengelolaan aset untuk memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dalam rangka peningkatan kualitas kinerja keuangan pada masing-masing perangkat daerah. Disarankan untuk lebih memperhatikan indikator penaksiran resiko yang dirasakan masih perlu ditingkatkan kembali yaitu dengan cara masing-masing pimpinan bagian pada unit kerja melakukan evaluasi, inventarisasi serta melakukan analisis resiko untuk masing-masing kegiatan yang akan dilaksanakan dengan klasifikasi yang lebih spesifik dalam melaksanakan pengendalian kinerja unit kerjanya masing-masing, sehingga kualitas pelaporan keuangan dapat lebih meningkat lagi.

Untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor pemerintahan atau sektor publik, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memasukan variabel lain yang berpengaruh

terhadap kualitas pelaporan keuangan, seperti, faktor budaya kerja, serta etika profesi yang dikaitkan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang tidak penulis masukkan sebagai variabel pada penelitian ini. Disarankan juga untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki pertanyaan ataupun pernyataan dalam kuesioner lebih spesifik dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman responden agar dapat digunakan untuk mengukur indikator-indikator lebih tepat lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur dan Azwari, Peny Cahaya. 2015. *The Effect Of The Implementation Of Government Internal Control System (GICS) On The Quality Of Financial Reporting Of The Local Government And Its Impact On The Principles Of Good Governance: A Research In District, City, And Provincial Government In South Sumatera. 2nd Global Conference on Business and Social Science-2015.*
- Arens. Alvin A., Elder, Randal J., Beasley, Mark S. 2014. *Auditing And Assurance Services : An Integrated Approach.* Prentice Hall.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta. Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. 2016. *Provinsi Banten Dalam Angka 2016 (Banten Province in Figures).*
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar.* Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga.
- Belkaoui, Ahmed.1993. *Accounting Theory.* Thomson Learning.
- Booz, Allen & Hamilton. 2013. *Strategy and Technology of Management.*
- Boynton, William C. Raymon N. Jhonson, Walter G & Kell. 2006. *Modern Auditing.* 8<sup>th</sup> Edition. USA. Richard D. Irwin Inc.
- British Standar Institution Publicly Available Spesification (BSI PAS) 55:2008. *Standar on Assets Management.*
- Burr and Girardi. 2002. Intellectual Capital : More Than The Interaction of Competence & Coomitment. *Australian Journal of Management Sydney, P.77-78.*
- COSO. 1992. *Internal Control-Integrated Framework.* Committee of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission.
- Elder, et al. 2010. *Auditing Standards Commitee Comment Letter PCAOB Rulemaking Docket Matte. SAS I (AU).*
- Gibson, J.L., Invancevich, J.M, & Donnelly, J.M. 1994. *Organization Behavior : Structure and Process.* 7<sup>th</sup> Edition. Boston. Homewood, Richard D. Irwin.
- Ghozali, Imam dan Hengky Latan. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris.* Edisi ke 2. Badan Penerbit UNDIP Semarang.
- Guilford, J.P. 1956. *Fundamental Statistic in Psychology And Education.* 3 rd Ed. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Hambali. 2010. *Inventarisasi Barang Milik Negara.* Bandung. Politeknik Negeri Bandung.
- Hamell, Gary & CK. 1994. *Strategy As a Field of Study : Why Search For A New Paradigm.*
- Hanis, Muhammad Hasbi, Bambang Trigunaryah, Connie Susilawati. 2017. The Application of Public Asset Management in Indonesian Local Government A Case Study in South Sulawesi Province. *Journal of Corporate Real Estate Vol.13 No.1,2017 pp36-47.*
- Hastings, Nicholas A. John. 2010. *Physical Asset Management.* Springer.
- Hitt, Michael Dan AR. 1999. *Strategic Management : Competitiveness & Globalization.*
- Hornby. 2000. *Managing Knowlege Worker : New Skill and Attitudes to Unlock The Intellectual Capital in Your Organization.* New York, John Willey and Son.
- Indriasih, Dewi dan Koeswayo, Poppy Sofia. 2014. The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toward The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 5, Issue 1 (Dec).*
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2013. *Standar Profesional Akuntan Publik.*
- Khari, Abdul. 2010. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya manusia Terhadap Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada PT. Avia Avian.* Skripsi. UPN Veteran, Jawa Timur .

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASET, SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA ASET, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten)**

- Kiranyanti, Ida Ayu Enny dan Erawati, Ni Made Adi. 2016. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis Akruwal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus (2016)*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010. *Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal*. Jakarta.
- Konrath, Laweey F. 2002. *Auditing Concepts and Applications, a Risk Analysis Approach*, 5<sup>th</sup> Edition. West Publishing Company.
- Mahmudin SW, Eka. 2017. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan dan Dampaknya Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Scientium Volume 6. No.1 Juni 2017:11-26*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mathis, R.L., and Jakson, J.H. 2004. *Human Resources Management*. International Student Edition. South Western, a division of Thompson Learning, Thompson Learning is a Trademark Used Herein Under License. In Singapore.
- Messier, William F, Steven M. Glover, and Douglas F. Prawitt. 2006. *Auditing & Assurance Services : a Systematic Approach*. 4<sup>th</sup> Edition. McGraw-Hill Companies Inc. New York.
- Narimawati, Umi. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Bandung. Agung Media.
- Nemmer. 2007. *Management Asset-Texas Style*.
- Pemerintah Provinsi Banten. 2017. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017*.
- Pramono, Yanuar, Icu. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat.
- Rohman A. 2007. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Pemda Kota, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah). *Jurnal MAKSI. Vol.7, No.2 p 206-220*.
- Rosdiana, Dian. 2009. *Pengaruh Implementasi Manajemen Aset terhadap Kewajaran Aset tetap di Neraca SKPD LKPD di Wilayah Provinsi Jawa Barat*. Tesis UNPAD. Tidak Dipublikasikan.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi – Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Adaptasi IFRS. Penerbit Erlangga.
- Safitri, Ratna Amalia. 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Setiyawati, Hari. 2013. The effect of Internal Accountant's Competence, Manager's Commitment to Organization and the Implementation of The Internal Control System on the Quality of Financial Reporting. *International Journal of Business and Management Invention Volume 2 Issue 11. November. 2013. PP.19-27*
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian*. Cetakan ke 8. Bandung : Alfabeta.
- Suyono, Nanang Agus. 2016. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Wonosobo). *Jurnal PPKM III (2016)237-248*.
- Tangke, John Gamara., Halim dan Gina Lucita. 2015. Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Negara, Volume 21 Nomor 1, April 2015/1-5*.
- Tugiman, Hiro. 2000. *Pandangan Baru Internal Auditing*. Penerbit Kanisius.
- Wakhyudi. 2012. *Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan Good Governance pada Sektor Publik*.
- Warren, Fees Reeve. 2005. *Accounting Pengantar Akuntansi*. Buku I Edisi 21, Jakarta. Erlangga.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rachmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Variabel Intervening Pengendalian Internal Akuntansi. *SNA XIII Purwokerto*.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- \_\_\_\_\_. BPK RI. 2018 Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017.
- \_\_\_\_\_. BPK RI. 2018. *Pres Release*. Penyerahan LHP Provinsi Banten atas LKPD Tahun 2017.

- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- \_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern  
Pemerintah.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai  
Negeri Sipil.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah.